

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah berakhirnya pemerintahan orde baru dan memasuki era reformasi, demokrasi di Indonesia terus berkembang sehingga mulai memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dicanangkan di Indonesia sejak tahun 2002 sesuai UU No.23 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk membangun daerah dalam rangka akselerasi pembangunan, mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Karianga, 2017). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Azlim, dkk 2012)

Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi masyarakatpun semakin kritis dalam mengawal pemerintahan. Hal ini menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangannya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Djalil, 2014). Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelconi, 2012 dalam Suratmi, dkk, 2014). Oleh karena itu, untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan keuangan atas semua kegiatan dan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah pemerintah telah melakukan kinerjanya dengan baik, efektif dan efisien sehingga tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu *good governance* terwujud.

Good governance menurut Zayn (2011) yaitu pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* dilaksanakan dengan menerapkan pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar benar mencapai target untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Salah satu perwujudan dari *good governance* adalah penyajian keuangan yang akuntabel. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel mengharuskan pemerintah untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Tahun 2019 pernyataan No. 1 disebutkan bahwa tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan untuk tujuan umum adalah laporan untuk tujuan bersama sebagian besar pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah

Sinaga, 2005 dalam Zayn, 2011. Karena tujuan inilah sebuah standar harus dimiliki oleh pemerintah. Dalam standar ini pula terdapat pedoman-pedoman struktur laporan keuangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Persyaratan yang paling tidak harus dipenuhi adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Untuk dapat terus melakukan pemerintahan yang sesuai dengan standar maka diperlukan evaluasi atau audit. Audit merupakan suatu pengujian atas keakuratan, objektivitas, kelengkapan atas laporan, pernyataan rekening tertentu dengan tujuan untuk menilai apakah sasaran audit tersebut sesuai dengan standar atau perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya (Harun, 2009:89). Audit tidak dilakukan hanya laporan keuangan saja tetapi juga pada kinerja individu. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah suatu agen sektor publik telah mengelola dan menggunakan sumber-sumber ekonominya dengan efektif dan efisien.

Akuntabilitas publik dapat akan lebih mudah terwujud apabila terdapat komitmen pada pegawai-pegawai pemerintah. Menurut Wiener, 1982 dalam buku Yusuf dan Syarif, 2018 komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi juga menimbulkan perasaan memiliki dalam organisasi sehingga pegawai akan melakukan kerjanya secara optimal agar tujuan-tujuan organisasi tercapai. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zayn (2011) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan komitmen organisasi yang tinggi mempengaruhi akuntabilitas keuangan serta diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi *good governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian intern.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2017) yang berjudul Pengaruh *good governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2018) yaitu penulis mengganti variabel pengendalian intern menjadi audit kinerja. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Siak sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Batu.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan?
2. Apakah ada pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan?
3. Apakah ada pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan?
4. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan?
6. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan?
7. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan.

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara *good governance* dengan akuntabilitas keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan.
7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara audit kinerja dengan akuntabilitas keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian (Teoretis dan Praktis)

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Batu

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan.

b. Bagi Akademisi

Dapat menambah ilmu pengetahuan terkait *good governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, audit kinerja, dan akuntabilitas keuangan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.